MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4 Tahun 2024

tentang

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, perlu diatur melalui tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;

b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal lain terkait dengan tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum

diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

SUHARTOYO

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	Penetapan Perolehan Suara		**27 November 2024**	**16 Desember 2024**	
1.	**Pengajuan Permohonan Pemohon**	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota	***27 November 2024*** 27 November 2024	***5 Desember 2024*** 18 Desember 2024	a) Pemungutan suara tanggal 27 November 2024; b) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024; c) Pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) hari

		b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota.	***27 November 2024*** 27 November 2024	***5 Desember 2024*** 18 Desember 2024	kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon melalui *email* dan *Whatsapp* yang telah didaftarkan
		c. Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota	***27 November 2024*** 27 November 2024	***5 Desember 2024*** 18 Desember 2024	

2.	**Memperbaiki dan Melengkapi Permohonan**	Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.	***27 November 2024*** 27 November 2024	***9 Desember 2024*** 20 Desember 2024	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
3.	**Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.	***10 Desember 2024*** 23 Desember 2024	***18 Desember 2024*** 3 Januari 2025	
4.	**Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota	***10 Desember 2024*** 23 Desember 2024	***18 Desember 2024*** 3 Januari 2025	

5.	**Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**	a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK	***10 Desember 2024*** 23 Desember 2024	***18 Desember 2024*** 3 Januari 2025	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
		b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;	***19 Desember 2024*** 6 Januari 2025		
		c. Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota	***19 Desember 2024*** 6 Januari 2025	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	

6.	**Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**	a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon: 1. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan)	***19 Desember 2024*** 6 Januari 2025	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	
		b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/ Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)			
7.	**Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait**	Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	***19 Desember 2024*** 6 Januari 2025	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	

8.	**Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait**	Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	***27 Desember 2024*** 10 Januari 2025	
9.	**Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan**	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	***27 Desember 2024*** 10 Januari 2025	
		b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon: 1. KPU Provinsi /KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan)			

		c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)			
		d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait	***20 Desember 2024*** 7 Januari 2025	***27 Desember 2024*** 10 Januari 2025	
10.	**Pemeriksaan Pendahuluan**	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	***24 Desember 2024*** 9 Januari 2025	***31 Desember 2024*** 14 Januari 2025	
11.	**Pemeriksaan Persidangan**	1. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota;	***31 Desember 2024*** 17 Januari 2025	***16 Januari 2025*** 30 Januari 2025	

		2. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	***2 Januari 2025*** 20 Januari 2025	***17 Januari 2025*** 31 Januari 2025	
12.	**Rapat Permusyawaratan Hakim**	Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	***20 Januari 2025*** 3 Februari 2025	***28 Januari 2025*** 11 Februari 2025	
13.	**Pengucapan Putusan/ Ketetapan**	Pengucapan Putusan/Ketetapan	***30 Januari 2025*** 12 Februari 2025	***31 Januari 2025*** 13 Februari 2025	
14.	**Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan**	Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD	***30 Januari 2025*** 12 Februari 2025	***4 Februari 2025*** 17 Februari 2025	
15.	**Pemeriksaan Persidangan Lanjutan**	Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	***3 Februari 2025*** 14 Februari 2025	***12 Februari 2025*** 25 Februari 2025	

16.	**Rapat Permusyawaratan Hakim**	Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	***13 Februari 2025*** 26 Februari 2025	***23 Februari 2025*** 6 Maret 2025	
17.	**Pengucapan Putusan/ Ketetapan**	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	***24 Februari 2025*** 7 Maret 2025	***26 Februari 2025*** 11 Maret 2025	
18.	**Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan**	Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD	***24 Februari 2025*** 7 Maret 2025	***28 Februari 2025*** 13 Maret 2025	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id